

SKRIPSI

**KONTEKS KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF
SIYASAH SYARIYYAH
(STUDI PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO)**

Oleh:

**DEWI TRILIA
NPM: 1702010018**



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1442 H/2021 M

**KONTEKS KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI
INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH
(STUDI PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DEWI TRILIA

NPM. 1702010018

Pembimbing 1 : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum

Pembimbing 2 : Firmansyah, M.H

Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1442 H/2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KONTEKS KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF
SIYASAH SYARIYYAH (STUDI PEMERINTAH DAERAH
KOTA METRO)

Nama : DEWI TRILIA
NPM : 1702010018
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang skripsi Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I,



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Metro, Januari 2021

Pembimbing II,



Firmansyah, M.H
NIP.198501292019031 002

NOTA DINAS

Nomor :

Lampiran : 1(satu)berkas

Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosahkan Saudara Dewi Trilia**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Di
Tempat

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan. Seperlunya maka Skripsi saudara:

Nama : **DEWI TRILIA**

NPM : 1702010018

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **KONTEKS KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH (STUDI PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Metro, Januari 2021

Pembimbing II,


Firmansyah, M.H
NIP.198501292019031 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

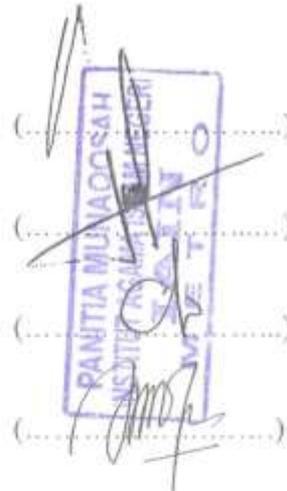
PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0223 / In.28.2 / D / Pp.00.g / 02 / 2021

Skripsi dengan Judul: KONTEKS KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH (Studi Pemerintah Daerah Kota Metro), disusun oleh: Dewi Trilia, NPM: 1702010018. Jurusan Hukum Tata Negara yang diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/28 Januari 2021.

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator	: Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum	(.....)
Penguji I	: Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji II	: Firmansyah, MH	(.....)
Sekretaris	: Siti Mustaghfiroh, M.Phil	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



**KONTEKS KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI
INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH
(STUDI PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO)**

ABSTRAK

Oleh:
DEWI TRILIA
1702010018

Penelitian difokuskan pada Konteks Kepemimpinan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif *Siyasah Syariyyah* (Studi Pemerintah Daerah Kota Metro). Kepemimpinan dalam Islam (*Siyasah Syariyyah*) khususnya di bidang pengelolaan Negara atau wilayah daerah harus menerapkan hukum yang tidak bertentangan dengan perspektif *Siyasah Syariyyah*, begitu pula dengan kepemimpinan seorang pemimpin dalam suatu wilayah Negara atau wilayah daerah, kepemimpinannya harus mengacu pada sistem ketatanegaraan yang berlaku di Negara Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konteks kepemimpinan Pemerintah Daerah Kota Metro Perspektif *Siyasah Syariyyah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari Walikota dan Wakil Walikota Metro, Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Metro serta Masyarakat Kota Metro. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Pemerintah Daerah Kota Metro Perspektif *Siyasah Syariyyah* mempunyai konteks kewenangan penguasa/Pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan umat. Pimpinan Daerah Kota Metro dalam menggerakkan pemerintahan kearah yang diinginkan sesuai dengan kemaslahatan umat, mempunyai program prioritas di berbagai bidang kehidupan yang telah dilaksanakan sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kota Metro. Program yang direncanakan sudah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah cepat tanggap dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pemerintahan. Pimpinan mempunyai jiwa religius dan profesional serta memiliki toleransi terhadap bawahan. Pimpinan juga melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahan sehingga program kerja bisa tercapai.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Trilia
NPM : 1702010018
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021

Yang menyatakan



Dewi Trilia

NPM. 1702010018

MOTTO

طِبَّانْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُونَ حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan
suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan
diri mereka sendiri.*

(QS. Ar-Ra'd : 11)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur serta memohon rahmat kepada Allah SWT, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda (Sarjingt) dan Ibunda (Subur) yang terkasih dan tersayang, terima kasih atas doa tulus serta dorongan moral dan moril teruntuk anakmu ini.
2. Kakak ku tercinta (Sri Yuniati), kakak tersayang pembimbing setia ku (Wida Oktriana) serta keponakanku terkasih (Erga Nanda Saputra) dan (Alesha Zahira) yang selalu mendoakan, memotivasi dan menantikan keberhasilanku.
3. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.M.Hum, dan Bapak Firmansyah, M.H, yang selalu sabar dalam membimbing dan mengajarku untuk menjadi lebih baik.
4. Sahabat-sahabatku (Nabila Putri Wima, Tri Agustin Chasanah, Niken Anggraini, Fitriyani, Agus Salim, Alif Darmawan, M. Munif Jazuli, Umy 'Azizah dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu lagi) kalianlah yang terbaik yang selalu memberikan *support* dan teman-teman KPM-DR 2020 *Ghibah Squad*.
5. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motivasi.
6. Resimen Mahasiswa Batalyon 205 Gagak Wulung Metro.
7. Keluarga Besar Saka Bhayangkara Polres Metro, terkhusus untuk Angkatan 2015 (Fachri Muhammad, Jihan Nabila Ikhsani, Nosihan Rahmadi, Bagas Noor Pambudi, Nabila Putri Wima, Wahyu Berliana, Devi Widya Sari, Bella Alfha Daisy, Ramadhan Anggit Sastrawan). Beserta Pamong (Drs. Wardaya, M.Pd., Bripka Zulham, Bripka Haery Kuriawan, S.IP., Ipda Wahyono)
8. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Semoga Allah SWT memberikan balasan amal perbuatan baik kepada semua pihak yang telah membantu selama proses pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D., Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum. Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan serta memberi motivasi dalam penyusunan skripsi.
4. Firmansyah, M.H. Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan serta memberi motivasi dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/ti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran selalu diharapkan demi perbaikan-perbaikan lebih lanjut.

Metro, Januari 2021

Peneliti



DEWI TRILIA

NPM. 1702010018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PESEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	14

A. Definisi Kepemimpinan Dalam Sistem Ketatanegaraan	14
B. Tipologi Kepemimpinan	16
1. Kepemimpinan Perspektif Ketatanegaraan	16
2. Kepemimpinan Perspektif <i>Siyasah Syariyyah</i>	21
C. Pengertian <i>Siyasah Syariyyah</i>	23
D. Landasan Hukum Kepemimpinan dalam Konteks	
Hukum Tata Negara dan <i>Siyasah Syariyyah</i>	25
1. Landasan Yuridis Kepemimpinan dalam Konteks	
Hukum Tata Negara Indonesia.....	25
2. Al-Quran	28
3. Hadits	30
E. <i>Maqashid Syariah</i>	31
1. Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat	32
2. Berdasarkan Kolektif dan Personal	33
3. Kebutuhan	33
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data.....	36
1. Sumber Data Primer.....	37
2. Sumber Data Sekunder.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Observasi	37
2. Wawancara.....	38
3. Dokumentasi	38
D. Teknik Analisis Data.....	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 40

A. Profil Daerah Kota metro	40
1. Sejarah Kota Metro	40
2. Visi Misi Kota Metro	42
3. Letak Geografis Kota Metro	44
4. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro	46
B. Konteks kepemimpinan dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasah Syariyyah di Pemerintah Daerah Kota Metro.....	51
C. Analisis Konteks Kepemimpinan dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasah Syariyyah di Pemerintah Daerah Kota Metro	59
 BAB V PENUTUP.....	 67
A. Kesimpulan	67
B. Keterbatasan Penelitian.....	68
C. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Nama Walikota Metro	42
Tabel 2. Luas Administratif Kota Metro	45
Tabel 3. Daftar Nama Pejabat Pemerintah Daerah Kota Metro Periode 2016-2021	48
Tabel 4. Kisi-Kisi Wawancara	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat *Research*
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin *Research*
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan perangkat-perangkat hukumnya adalah perangkat-perangkat hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kepemimpinan dalam Islam (*Siyasah Syariyyah*) khususnya di bidang pengelolaan Negara atau wilayah daerah harus menerapkan hukum yang tidak bertentangan dengan perspektif *Siyasah Syariyyah*, juga kepemimpinan seorang pemimpin dalam suatu wilayah Negara atau wilayah daerah, kepemimpinannya harus mengacu pada sistem ketatanegaraan yang berlaku di Negara Indonesia.¹

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kepemimpinan seorang pemimpin dalam memimpin wilayahnya harus sesuai dengan konstitusinya, dalam hal ini adalah UUD 1945. Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, dalam hal ini Ideologi Negara dan Bangsa Indonesia adalah Pancasila dan perangkat hukum tertingginya adalah UUD 1945.

Kota Metro adalah salah satu kota di Provinsi Lampung sedang melakukan pembenahan dan pengembangan kota yang lebih maju menuju Visi dan Misinya sebagai kota pendidikan dan wisata keluarga di Provinsi

¹ Wawancara dengan Bapak Azmi Siradjuddin (Bapak Azmi Siradjuddin adalah Dosen Fakultas Syariah dan Kajar Hukum Tata Negara)

Lampung dengan memperbaiki sektor pendidikan, keamanan, kebersihan serta meningkatkan fasilitas publik, pengoptimalan ruang terbuka hijau.

Kota Metro yang termasuk dalam wilayah Negara Indonesia yang mempunyai seorang pemimpin muslim dengan mayoritas penduduknya adalah Islam. Selain itu ada juga yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Sehingga terdapat keberagaman dalam bidang keagamaan, ras, suku, dan etnis di Kota Metro.

Maka setiap orang yang memegang suatu jabatan untuk menangani urusan kaum muslimin berkewajiban memilih bawahannya pada setiap posisi dari setiap personil yang memiliki kemampuan terbaik di bidangnya. Jika penguasa lebih mengutamakan orang lain daripada orang yang lebih berhak dan lebih baik dikarenakan adanya hubungan kekerabatan, karena loyalitas hubungan kedekatan persahabatan, kesamaan asal daerah, madzhab, cara atau kesamaan ras, atau dikarenakan suap yang diambilnya berupa materi atau manfaat, dikarenakan adanya ketidaksukaan dalam hatinya terhadap orang yang lebih berhak, maka dengan demikian dia benar-benar telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman sehingga dia masuk dalam larangan Allah.²

Kemudian, orang yang menunaikan amanah dibarengi dengan melawan hawa nafsunya akan diberi keteguhan oleh Allah, lalu dia akan menjaga keluarga dan harta kekayaannya kelak. Sebaliknya, penguasa yang menuruti hawa nafsu akan di adzab oleh Allah dengan kebalikan

² Muhammad bin Shalih, *Politik Islam Ta'liq Siyash Syariyyah Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), 34.

yang ia inginkan sehingga keluarganya menjadi hina dan harta kekayaannya sirna.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai judul skripsi. Penelitian ini berlokasi pada Pemerintah Daerah Kota Metro. Peneliti akan memaparkan fenomena-fenomena yang muncul dan terjadi pada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana fenomena-fenomena ini menarik untuk dipaparkan pada point kedua ini.

Fenomena-fenomena tersebut antara lain beberapa Kepala Daerah di Provinsi Lampung yang terjerat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (6/10/2019) salah satunya adalah Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Agung Ilmu Mangkunegara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait proyek pada Dinas Perdagangan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Utara.³

Hal serupa juga menjerat Bupati Lampung Tengah Mustafa. Mustafa terbukti menyuap beberapa anggota DPRD Lampung Tengah sejumlah Rp 9,6 miliar. Penyuapan itu dilakukan bersama-sama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. Pemberian uang tersebut bertujuan agar anggota DPRD tersebut memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada

³ Lampung Post, "KPK OTT Kepala Daerah di Lampung", www.lampungpost.com diunduh pada 10 Juni 2020.

PT. Sarana Multi Insfrastruktur (Persero) sebesar Rp 300 miliar pada tahun anggaran 2018.⁴

Kemudian, agar anggota DPRD menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar. Pada 30 Januari 2019, Mustafa kembali ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam perkara penerimaan *fee* dari proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran *fee* sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Nilainya diduga sekitar Rp 95 miliar.⁵

Provinsi Lampung Masuk dalam zona merah korupsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya sudah ada Kepala Daerah yang di tangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di antaranya mantan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, Mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, dan Mantan Bupati Mesuji Khamamik.

Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa pentingnya suatu wilayah Negara atau wilayah daerah harus mempunyai seorang pemimpin yang harus menerapkan hukum yang tidak bertentangan dengan perspektif siyasah syariyyah, juga kepemimpinan seorang pemimpin dalam suatu

⁴ Lampung Post, “KPK OTT Kepala Daerah di Lampung”, www.lampungpost.com diunduh pada 10 Juni 2020.

⁵ Dylan Aprialdo Rachman, “Lima Kepala Daerah di Lampung yang dijerat KPK”, www.kompas.com diunduh pada 10 Juni 2020.

wilayah Negara atau wilayah daerah, kepemimpinannya harus mengacu pada sistem ketatanegaraan yang berlaku di Negara Indonesia.

Kepemimpinan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sangat penting karena kepemimpinan merupakan suatu ilmu tentang bagaimana mempengaruhi, mengarahkan, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan.⁶ Kepemimpinan pada dasarnya merujuk pada gaya seorang pemimpin dalam memimpin di suatu wilayah atau pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu.

Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan, dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tidak diperoleh dengan cepat dan segera namun sebuah proses yang terbentuk dari waktu ke waktu hingga akhirnya mengkristal dalam sebuah karakteristik. Dalam artian ada sebagian orang yang memiliki sifat kepemimpinan namun dengan usahanya yang gigih mampu membantu lahirnya penegasan sikap kepemimpinan pada dirinya tersebut.⁷

Dorongan dan semangat kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin mampu menggerakkan organisasi ke arah yang diinginkan, namun begitu pula sebaliknya jika kualitas dan kompetensi seorang pemimpin adalah belum mencukupi untuk membantu mendorong ke arah kemajuan, maka artinya pemimpin tersebut hanya memimpin dengan tujuan untuk pribadinya dan bukan untuk tujuan keinginan organisasi.

15. ⁶ Irham Fahmi, *Managemen Kepemimpinan Teori & Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013),

⁷ Aminudin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 43

Sesuai dengan BAB III yaitu Muatan Materi pada Pasal 8 yaitu pada point a Ayat 3 berbunyi: pelaksanaan dan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara. Ayat ini memberikan penekanan bahwa kepemimpinan yang berdasarkan Konstitusi yaitu UUD 1945 bahwa pelaksanaan, penegakan, dan pembagian dalam menjalankan roda pemerintahan harus sesuai dengan UUD 1945.⁸

Juga Kepemimpinan merujuk pada pemikiran politik Islam dikenal istilah *Siyasah Syar'iyah*, yaitu “pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara*”.⁹ Perspektif perpolitikan bertujuan agar seluruh kebijakan yang dibuatnya mengarah pada terciptanya kebaikan bagi rakyat banyak, *masalah'ammah*. Politik dalam terminologi syari'ah disebut siyasah. Sedangkan politik yang berdasarkan dan berorientasi pada syari'ah disebut *Siyasah Syar'iyyah*. Al-Qur'an sebagai sumber syari'ah telah menggariskan dasar-dasar politik. Karenanya politik dalam perspektif syari'ah mesti dibangun atas doktrin-doktrin yang ada di dalam Al-Qur'an.

Hasbi Ash-Shiddiq di dalam bukunya “Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam” menjabarkan dua buah ayat surah An-Nisa yaitu ayat 58 dan 59 menjadi “panca dasar pemerintahan Islam” yaitu :

1. Menunaikan amanah.

⁸ Bagir Manan, *Hukum Positi Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 112.

⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Kencana, Jakarta, 2003, 1.

2. Menegakkan keadilan.
3. Mentaati Allah dan Rasulnya.
4. Menegakkan kedaulatan rakyat dengan jalan mengadakan permusyawaratan atau perwakilan rakyat dan mengangkat kepala negara menurut kehendak rakyat.
5. Menjalankan hukum-hukum dan undang-undang dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya.¹⁰

Kepemimpinan menurut Q.S. An-Nisa ayat 58-59.¹¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S.An-Nisa’ayat 58)

¹⁰ Djazuli, Fiqih Siyasa, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 161-162.

¹¹ Q.S. An-Nisa’ (4): 58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya:

“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa’ ayat 59).¹²

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis dalam bentuk proposal dengan judul **“KONTEKS KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH (STUDI PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO)”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana Konteks

¹² Q.S An-Nisa’ (4): 59.

Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kota Metro Perspektif *Siyasah Syariyyah*?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti untuk mengangkat penelitian ini adalah untuk mengetahui Konteks Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kota Metro Perspektif *Siyasah Syariyyah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai media belajar bagi peneliti dalam memecahkan masalah dan khususnya yang berkaitan dengan Konteks Kepemimpinan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif *Siyasah Syariyyah*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif terhadap pihak terkait. Dapat menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut terhadap implementasi di lapangan dalam kepemimpinan yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan skripsi adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan

tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.¹³ Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu, bahwa pembahasan terkait dengan konteks kepemimpinan sudah penulis temukan. Meskipun tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang berjudul “Tinjauan Fiqh *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance* (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)” ditulis oleh Agung Pangestu Dwi Rahmana/ 23141008 (2018).¹⁴

Skripsi ini membahas prinsip-prinsip *Good Governance* yang sesuai dengan *siyasah syar'iyah*. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, pemerintah selalu mengedepankan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh *Good Governance*, yaitu: transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien, serta penegakkan hukum, supaya masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, baik pemerintah maupun masyarakat selalu bekerja sama dalam menciptakan suasana kondusif, memberikan rasa aman dan nyaman, jauh dari kegaduhan, diatas bingkai yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam supaya prinsip yang

¹³ Zuhairi et al., *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 30.

¹⁴ Agung Pangestu Dwi Rahmana, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)*” (Medan: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018)

diajarkan oleh *Good Governance* senapas dengan ajaran Islam dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

2. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang berjudul "Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat)" ditulis oleh Eva Fauziah/ 2314.4.004 (2019).¹⁵

Skripsi ini membahas tugas pokok dan fungsi kepemimpinan terutama kepala desa dalam memberdayakan masyarakat dengan tinjauan Fiqh Siyasah. Dilihat dari tinjauan fiqh siyasah itu sendiri adalah: Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf; Menjalankan hukum-hukum di antara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakatnya, sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain; Menjaga keamanan dalam negeri sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing; Menegakkan *hudud* (hukum pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara; Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan serangan pihak luar; Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangunkan dari dakwah Islam; Mengelola keuangan negara

¹⁵ Eva Fauziah, "*Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat)*", (Medan: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019)

seperti *Ghanimah, Al-Fa'*, Pajak, dan Sedekah lainnya; Menentukan belanja negara (APBN); Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan dan kepercayaan mereka memegang jabatan tersebut; dan secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum.

Kesimpulannya adalah sangat penting tugas dan fungsi kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakatnya yang sejalan dengan ajaran Islam di tinjau dari Fiqh Siyasah. Artinya, kepala desa mempunyai peran kepemimpinan yang akan membawa kemajuan bagi desa nya dengan memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam fiqh siyasah.

3. Jurnal IAIN Sultan Amai Gorontalo, yang berjudul “Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam” ditulis oleh Ahmad Khoirul Fata (2012).¹⁶

Jurnal ini membahas tentang merumuskan konsep kepemimpinan ideal sesuai dengan Islam. Penelitian ini melihat bagaimana kepemimpinan memiliki arti besar bagi umat Islam dan Islam. Menurut Islam, titik urgensi terletak pada kenyataan bahwa kepemimpinan merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan hidup masyarakat itu. Meskipun latar belakang sosial-politik pemikir muslim berbeda, studi ini menemukan benang merah, bahwa dalam kepemimpinan, orang menyadari bahwa masyarakat bisa eksis dengan

¹⁶ Ahmad Khoirul Fata, “*Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*”, Jurnal Review Politik, volume 02, no 01, Juni 2012.

nilai-nilai berdasarkan Islam. Kepemimpinan memiliki nilai-nilai kesakralan karena terkait erat dengan bagaimana memberlakukan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kesimpulannya adalah dari kajian tersebut setidaknya terlihat bahwa sesungguhnya kepemimpinan bukanlah hal yang kotor sebagaimana politik dewasa ini. Sebaliknya, kepemimpinan menurut para pemikir muslim klasik tersebut tampak memiliki nilai-nilai kesakralan karena terkait erat dengan memberlakukan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendapat inilah yang seharusnya dapat menginspirasi kita untuk kembali memikirkan kondisi sosio-politik di era kekinian dan membangun ulang konsep-konsep kepemimpinan di zaman kita agar bisa kembali berjalan dalam koridor kesucian sebagai alat untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Kepemimpinan Dalam Sistem Ketatanegaraan

Kepemimpinan memiliki kata dasar yang sama dengan pemimpin, yakni pimpin. Kemudian mendapatkan awalan 'ke' dan akhiran 'an' yang

menjadikannya berubah menjadi kata sifat dari pemimpin. Artinya kepemimpinan harus menjadi sifat dan sikap yang *inheren* dalam diri seorang pemimpin.¹⁷

George R. Terry menyatakan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang lain untuk secara sukarela mau berjuang mencapai tujuan-tujuan kelompok. Sejalan dengan pernyataan ini, kita dapatkan dua meteri yang utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yakni adanya usaha (dari pemimpin) mempengaruhi orang lain (yang tidak dibatasi oleh jenis kelompok atau organisasinya), dan tujuan tujuan kelompok akan dicapai. Pencapaian tujuan-tujuan organisasi dilaksanakan dengan pengelolaan fungsi-fungsi manajemen oleh seorang pemimpin. Yaitu, perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*).¹⁸

Tujuan akhir setiap Negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, *bonum publicum*. Dalam konstitusi UUD 1945 (*preamble*) dituliskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah "...melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...".¹⁹ Untuk meraih cita-cita Negara, dibutuhkan pemerintah yang akan menggerakkan Negara untuk melaksanakan program-program yang akan mencapai kebahagiaan rakyat.

¹⁷ Farkhani, *Hukum tata Negara*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 107.

¹⁸ Soejono Trimono, *Analisis Kepemimpinan*, (Bandung : Offset Angkasa, 1995), 9.

¹⁹ UUD 1945, *Preamble*

Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin Negara/Pemerintahan yang visioner dan kompeten dengan tujuan sebuah negara.

Secara terminologi, dapat dilacak beberapa pengertian tentang kepemimpinan dari beberapa orang ahli, di antaranya adalah Stephen P. Robbins mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya tujuan. Richard L. Daft mengatakan, kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Menurut Siagian berpendapat bahwa kepemimpinan adalah keterampilan dan kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi mau pun lebih rendah daripadanya dalam berfikir dan bertindak agar perilaku yang semula mungkin individualistik dan egosentrik berubah menjadi perilaku organisasional. Menurut Stogdill menyimpulkan bahwa banyak sekali definisi mengenai kepemimpinan, dan diantaranya memiliki beberapa unsur yang sama. Sedangkan menurut Sarros dan Butchatsky, istilah ini dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi.

Konsep kepemimpinan merupakan komponen fundamental di dalam menganalisis proses dan dinamika di dalam organisasi. Untuk itu banyak kajian dan diskusi yang membahas definisi kepemimpinan yang justru membingungkan. Menurut Katz dan Kahn berbagai definisi

kepemimpinan pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yakni “sebagai atribut atau kelengkapan dari suatu kedudukan, sebagai karakteristik seseorang, dan sebagai kategori perilaku”.²⁰

B. Tipologi Kepemimpinan

1. Kepemimpinan Perspektif Ketatanegaraan

Sebagai titik tolak dalam pembahasan tipologi kepemimpinan yang secara luas dikenal dewasa ini, lima tipe kepemimpinan yang diakui keberadaannya ialah:²¹

- a. Tipe Otokratik;
- b. Tipe Paternalistik;
- c. Tipe Kharismatik;
- d. Tipe *Laissez Faire*; dan
- e. Tipe Demokratik.

Masing-masing tipe kepemimpinan tersebut tentu memiliki karakteristik tertentu yang membedakan satu tipe dari tipe yang lain.

a. Tipe yang Otokratik

Seorang pemimpin yang otokratik cenderung menganut nilai organisasional yang berkisar pada membenaran segala cara yang ditempuh untuk pencapaian tujuannya. Sesuatu tindakan akan dinilai benar apabila tindakan itu mempermudah tercapainya tujuan

²⁰ Udik Budi Wibowo: *Teori Kepemimpinan* (BKD Kota Yogyakarta, 2011)

²¹ Sondang P.Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, cet. ke-6 (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 27.

dan semua tindakan yang menjadi pengahalang akan dipandanginya sebagai sesuatu yang tidak baik.

Seorang pemimpin yang otokratik dalam praktek akan menggunakan gaya kepemimpinan yang:

- a. menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya;
- b. dalam menegakkan disiplin menunjukkan kekakuan;
- c. bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi;
- d. menggunakan pendekatan punitif (tindakan kekerasan karena ketidakpuasan yang dirasakan oleh sekelompok orang) dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahan.

Artinya efektivitas kepemimpinan yang otokratik sangat dikaitkan dengan kekuasaan untuk mengambil tindakan yang punitif. Biasanya, apabila kekuasaan mengambil tindakan yang punitif itu tidak dimilikinya lagi, ketaatan para bawahan segera mengendor dan disiplin kerja pun segera merosot.

b. Tipe yang Paternalistik

Tipe kepemimpinan yang paternalistik banyak terdapat dilingkungan masyarakat yang masih bersifat tradisional, umumnya di masyarakat yang agraris. Popularitas pemimpin yang paternalistik disebabkan oleh beberapa faktor.

Persepsi seorang pemimpin yang paternalistik tentang peranannya dalam kehidupan organisasional dapat dikatakan diwarnai oleh harapan pengikutnya kepadanya. Harapan itu pada umumnya

berwujud keinginan agar pemimpin mereka mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan yang layak dijadikan sebagai tempat bertanya dan untuk memperoleh petunjuk.

Ditinjau dari segi nilai-nilai organisasional yang dianut, biasanya seorang pemimpin yang paternalistik mengutamakan kebersamaan. Nilai demikian biasanya terungkap dalam kata-kata seperti “seluruh anggota organisasi adalah anggota satu keluarga besar” dan pernyataan-pernyataan lain yang sejenis. Berdasarkan nilai-nilai kebersamaan itu, dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang paternalistik kepentingan bersama dan perlakuan yang seragam terlihat menonjol pula. Artinya pemimpin yang bersangkutan berusaha memperlakukan semua orang dan semua satuan kerja yang terdapat di dalam organisasi seadil dan setara mungkin.

Sikap demikian mau tidak mau tercermin dalam perilaku pemimpin yang bersangkutan. Tindak-tanduk yang menggambarkan bahwa hanya pemimpin yang bersangkutanlah yang mengetahui segala sesuatu mengenai seluk beluk kehidupan organisasi. Karena tindak-tanduk demikian tidak mustahil bahwa dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang paternalistik, terjadi pemusatan pengambilan keputusan dalam diri pemimpin yang bersangkutan sedangkan para bawahan tinggal melaksanakannya saja. Pimpinanlah tempat bertanya karena dia menganggap bahwa dia mempunyai

jawaban terhadap semua jenis permasalahan yang dihadapi oleh organisasi.

Penonjolan dominasi keberadaannya dan penekanan kuat pada kebersamaan, gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang paternalistik lebih bercorak pelindung, bapak dan giri. Artinya kebersamaan bagi para anggota organisasi sedangkan pemimpin yang bersangkutan berada di atas para anggota tersebut.²²

c. Tipe yang Kharismatik

Seorang pemimpin yang kharismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu itu dikagumi. Sesungguhnya sangat menarik untuk memperhatikan bahwa para pengikut seorang pemimpin yang kharismatik tidak mempersoalkan nilai-nilai yang dianut, sikap dan perilaku serta gaya yang digunakan oleh pemimpin yang di ikutinya itu. Bisa saja seorang pimpinan yang kharismatik menggunakan gaya yang otokratik atau diktatorial, para pengikutnya tetap setia kepadanya. Mungkin pula seorang pimpinan yang kharismatik menggunakan gaya yang paternalistik, tetap ia tidak kehilangan daya pikatnya. Daya tariknya pun tetap besar bila ia menggunakan gaya yang demokratik atau partisipatif.

d. Tipe yang *Laissez Faire*

²² Sondang P.Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 36.

Pemimpin yang *laissez faire* memiliki pandangan bahwa nilai yang tepat dalam hubungan atasan dan bawahan adalah nilai yang didasarkan kepada saling mempercayai yang besar. Dengan sikap yang permisif, perilaku seorang pemimpin yang *laissez faire* cenderung mengarah kepada tindak-tanduk yang memperlakukan bawahannya sebagai rekan sekerja, hanya saja kehadirannya sebagai pimpinan diperlukan sebagai akibat dari adanya struktur dan hierarki organisasi.

e. Tipe yang Demokratik

Seorang pemimpin yang demokratik dihormati dan disegani dan bukan ditakuti, karena perilakunya dalam kehidupan organisasional perilakunya mendorong para bawahannya menumbuhkan dan mengembangkan daya inovasi dan kreativitasnya. Dengan sungguh-sungguh ia mendengarkan pendapat, saran dan bahkan kritik orang lain, terutama para bawahannya. Bahkan seorang pemimpin yang demokratik tidak akan takut membiarkan para bawahannya berprakarsa meskipun ada kemungkinan prakarsa itu akan berakibat pada kesalahan. Jika terjadi kesalahan, pimpinan yang demokratik berada disamping bawahan yang berbuat kesalahan itu bukan untuk menindak atau menghukumnya, melainkan meluruskannya sedemikian rupa sehingga bawahan tersebut belajar

dari kesalahannya itu dan dengan demikian menjadi anggota organisasi yang lebih bertanggung jawab.²³

Semua tipologi yang disebutkan di atas memiliki kisah keberhasilan dan kegagalannya. Artinya model atau tipe apapun yang digunakan bisa berhasil atau gagal dalam tataran aplikasinya.

2. **Kepemimpinan Perspektif *Siyasah Syariyyah***

Kepemimpinan dalam Islam (*Siyasah Syariyyah*) khususnya di bidang pengelolaan Negara atau wilayah daerah harus menerapkan hukum yang tidak bertentangan dengan perspektif *Siyasah Syariyyah*. Islam secara spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan wajib untuk bermusyawarah. Terdapat dalam Q.S Al-Imran Ayat 159 dan Q.S As-Syuraa Ayat 38 yang berkenaan dengan masalah musyawarah.

... اللَّهُ عَلَىٰ فِتْوَاهُ لَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ بِمَشْوَرْتِكُمْ حَتَّىٰ تَتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا بِهِ مِنَ الْكِتَابِ...²³

Artinya:

²³ Sondang P.Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, cet. ke-6 (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 45.

“...Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah...” (Ali-Imran/3 : 159)²⁴

...بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ...

Artinya:

“...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...” (Asy-Syura/42 : 38)²⁵

Kaum muslimin tidak memutuskan masalah dengan pendapat mereka sendiri hingga mereka bermusyawarah serta bersepakat dalam satu masalah. Dengan demikian, karena kuatnya perhatian dan kewaspadaan mereka, jujurnya persaudaraan mereka dalam keimanan, dan saling cinta mencintai diantara mereka karena Allah. Jika demikian halnya, maka musyawarah adalah salah satu dari dasar-dasar Islam dalam bermasyarakat dan berpolitik. Dan wajib bagi pemimpin kaum muslimin untuk mengambil pembantu-pembantu yang shalih untuk menjadi penasehatnya (yang diminta pendapat mereka dengan bermusyawarah).

C. Pengertian *Siyasah Syariyyah*

²⁴ Q.S. Ali-Imran (3): 159.

²⁵ Q.S. Asy-Syura (42): 38.

Pengertian harfiah kata “*Siyasah*” diantaranya adalah pengaturan, pengasuhan, pendidikan karakter dan perbaikan.²⁶ *Siyasah Syar’iyyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

1. Menurut Imam al-Bujairimi: memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.
2. Menurut Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi al-Kuwait Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.

Abdul Mudjib berkata, “Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.” Salah satu kaidah fiqih yang erat kaitannya dengan pemerintahan ketika dilihat dari sudut pandang cakupannya yang luas adalah kaidah fiqih yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Dapat diartikan bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap orang yang berada di bawah kepemimpinannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi yang diraih atau berupa bahaya dan kerusakan yang terhindarkan dari orang-orang yang ada di

²⁶ Muhammad bin Shalih, *Politik Islam Ta’liq Siyasah Syariyyah Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), 13.

bawah kepemimpinannya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berorientasi terhadap perbaikan seluruh rakyatnya. Mengingat tindakan dan kebijakan yang ditempuh dan diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu saja atau bahkan untuk kepentingan diri pribadinya.²⁷

Ahmad Fathi Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan *syara*.²⁸ Sementara para *fuqaha*, sebagaimana di kutip khallaf, mendefinisikan *Siyasah Syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk hal itu.

Analisis definisi-definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *Siyasah Syar'iyah*, yaitu:

1. Bahwa *Siyasah Syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia;
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan(*ulu ai-amr*);

²⁷ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61.

²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, cet-6, 2017), 1.

3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan;
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan hakikat *Siyasah Syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *Siyasah Syar'iyah* adalah Al-Quran dan As-sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

D. Landasan Hukum Kepemimpinan dalam Konteks Hukum Tata Negara dan *Siyasah Syariyyah*

1. Landasan Yuridis Kepemimpinan dalam Konteks Hukum Tata Negara Indonesia

Bangsa Indonesia baru memiliki Negara yang berdaulat setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan itu adalah hasil dari sebuah episode panjang perjuangan seluruh Bangsa Indonesia. Semboyan “merdeka atau mati” menjadi harga mati seluruh pejuang saat itu. Ada cerita yang cukup menarik pada detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan itu. Soekarno yang menetapkan diri nonkooperatif terhadap Belanda, pada penjajah Jepang berubah haluan, menjadi kooperatif dengan penjajah. Sikap kooperatifnya ini mengarahkan dia menjadi kurang responsif terhadap ajakan untuk segera memerdekakan diri pada saat kondisi

facum of power pasca kekalahan Jepang oleh tentara Sekutu. Sementara para pejuang lainnya seperti Sutan Syahrir berbeda haluan dengan Soekarno-Hatta saat itu, tetap berjuang lewat gerakan *underground*. Para pejuang yang dipimpin oleh Syahrir inilah yang menjadi otak “penculikan” Soekarno-Hatta.

Berkenaan dengan kecepatan menerima berita internasional, Syahrir dan kawan-kawan lebih cepat dari Soekarno-Hatta, karena Syahrir memiliki pesawat radio gelap. Seluruh berita politik internasional sangat mudah diterima Syahrir tanpa ada sensor dari pemerintah penjajah. Berita jatuhnya bom atom pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki dan Heroshima, luluh lantaknya kekuatan Jepang di Saipan, Pasifik, bunuh diri masal serdadu Jepang di Okinawa dan pidato Kaisar Hirohito tentang pernyataan menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 menjadi bahan akurat bagi Syahrir dan pemuda nasionalis saat itu untuk segera mendesak deklarasi kemerdekaan secepatnya. Bahkan pada tanggal 15 Agustus 1945, dr. Soedarsono sempat membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang disusun oleh Syahrir, tapi sayang teks itu hilang.

Para pemuda nasional yang sudah mendapat berita rentetan kekalahan dan menyerahnya Jepang kepada Sekutu, menilai Soekarno-Hatta lamban bereaksi. Akhirnya dengan sangat terpaksa pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00, Soekarni, Wikana dan Chaerul Saleh “menculik” dan membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok,

Karawang. Disana Soekarno-Hatta didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu terjadi perdebatan antara golongan tua dan muda berjalan alot. Walaupun terjadi beberapa kesepakatan tentang proklamasi kemerdekaan, tapi kondisi dan situasi yang diinginkan oleh golongan muda tidak begitu mendukung dan menguntungkan, tak ada dukungan penuh dari anggota PETA.

Tapi Tuhan berkendak lain, setelah perundingan itu ternyata keesokan harinya Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah itu, Soekarno-Hatta ditunjuk oleh PPKI menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Dari berbagai catatan, pada sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 banyak putusan yang diambil, diantaranya pengesahan UUD 1945 dan penunjukkan presiden. Semua putusan itu sangat cepat dan singkat, karena kebutuhannya adalah agar Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat baik secara *the jure* maupun *the facto*, serta pengakuan dunia internasional.

Bila dilihat dari sejarah penunjukan itu berawal dari usulan Otto Iskandardinata dan berbeda dengan isi dari konstitusi yang baru saja disahkan, yakni lewat pemilihan. Maka dapat dikatakan penunjukan itu tidak berkesesuaian dengan UUD 1945 yang menjadi konstitusi negara. Kondisi revolusi saat itu sajalah yang dapat membenarkan peristiwa penunjukkan presiden dan wakil presiden.

Setelah itu, konfigurasi politik dibarengi dengan beberapa kali perubahan sistem pemerintahan Soekarno mulus menjadi presiden dengan memanfaatkan perubahan-perubahan situasi politik. Bahkan sampai pada menjadikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Dilihat dari berbagai kasus dalam negara modern, landasan hukum yang dipakai dalam menentukan atau memilih kepala negara adalah konstitusi negara. Dalam konteks Indonesia, berarti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam konstitusi UUD 1945 terutama pada pasal 7.²⁹

2. Al-Quran

a. QS. An-Nisa':59:³⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

59. *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

²⁹ Farkhani, S.HI., S.H., M.H. *Hukum tata Negara*,(Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 134.

³⁰ QS. An-Nisa' (4): 59.

Ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum.³¹

b. QS. Al-Baqarah: 247.³²

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٤٧)

247. Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini dapat diambil pengertian bahwa seorang yang akan dijadikan raja atau pemimpin itu hendaklah :

³¹ Muhammad bin Shalih, *Politik Islam Ta'liq Siyasa Syariyyah Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2019), 25.

³² QS. Al-Baqarah (2): 247.

1. Mempunyai kekuatan fisik sehingga mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala Negara.
2. Menguasai ilmu pengetahuan yang luas, mengetahui letak kekuatan umat dan kelemahannya, sehingga dapat memimpinya dengan penuh bijaksana.
3. Memiliki kesehatan jasmani dan kecerdasan pikiran.
4. Bertaqwa kepada Allah SWT agar mendapat taufik dan hidayah-Nya, untuk mengatasi segala kesulitan yang tidak mungkin diatasinya sendiri, kecuali dengan taufik dan hidayah-Nya.

3. Hadits

أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ibn Umar r.a berkata : saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta

pertanggungjawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya. (Bukhari, Muslim).³³

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menasihatkan kepada Abdurrahman bin Samurah *radhiallahu 'anhu*:

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ
أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِن أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا

“Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan diberi taufik kepada kebenaran). Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya akan dibebankan kepadamu (tidak akan ditolong).” (Bukhari, Muslim).

E. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *maqashid syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan

³³ Imam Nawawi, “*Riyadh ash Shalihin*”, (Jakarta : Pustaka Amani, cet. ke-4, 2013), 509

pensyariaan hukum. Oleh karena itu, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³⁴

Berdasarkan tingkat kepentingannya, *maqashid syariah* bisa dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi.³⁵

1. Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, maslahat terbagi tiga tingkatan hierarkis, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

a. *Dharuriyyat*

Dharuriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *Al-kulliyat al-khamsah* (الخمسة الكلية) merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, nasab, dan harta.

b. *Hajiyyat*

Hajiyyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu‘amalah termasuk dalam tingkatan ini.

c. *Tahsiniyyat*

³⁴ Ghofar Shidiq, “Teori *Maqashid al-Syari’ah* dalam Hukum Islam,” Sultan Agung VOL XLIV NO. 118 Juni-Agustus 2009, 118.

³⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 56.

Tahsiniyyat adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus.

2. Berdasarkan Kolektif dan Personal

Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara kolektif maupun personal, maslahat terbagi menjadi dua:

a. *Kulliyah*

Kulliyah yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Menjaga persatuan umat Islam, memelihara dua kota suci Mekah dan Madinah, menjaga hadits-hadits Nabi saw jangan sampai bercampur dengan hadits-hadits palsu (*maudhu'*) adalah di antara contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam Ibnu 'Asyur.

b. *Juz'iyah*

Juz'iyah adalah kebalikan dari itu. *Maslahah juziyyah* ini banyak terdapat dalam muamalah.

3. Kebutuhan

Adapun berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, maslahat terbagi menjadi tiga: *qath'iyah, zhanniyyah dan wahmiyyah*.

a. *Qath'iyah*

Qath'iyah yaitu maslahat yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwil.

b. *Zhanniyyah*

Zhanniyyah adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal.

c. *Wahmiyyah*

Wahmiyyah adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan.

Pada point E yaitu *maqashid syariah* peneliti dalam judul skripsi ini ingin mendeskripsikan bahwa konteks kepemimpinan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan sebuah kajian yang tidak luput dari peranannya *maqashid syariah*. Di mana *maqashid syariah* mengimplementasikan bahwa kepemimpinan seorang pemimpin satu sisi kepemimpinannya berdasarkan konstitusi dan satu sisi kepemimpinan seorang pemimpin perspektif siyasah syariyyah harus mengikuti teori-teori yang ada pada *maqashid syariah*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka terdapat empat kata kunci dari penelitian ilmiah yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.³⁶

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan terjun langsung ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁷

³⁶ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

³⁷ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah laporan evaluasi yang mencakup sejumlah besar pengalaman orang. Deskripsi ditulis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa.³⁸

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dengan menguraikan atau merumuskan sesuatu hal dengan logis, bersifat nyata dan benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan “Konteks Kepemimpinan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif *Siyasah Syariyyah* (Studi Pemerintah Daerah Kota Metro)”.

B. Sumber Data

Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber Data Primer

³⁸Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 255.

Sumber data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu Walikota dan Wakil Walikota Metro, Pejabat Pemerintah Daerah Kota Metro serta masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari berbagai literatur terkait dengan kepemimpinan dan *Siyasah Syariyyah* seperti buku, undang-undang serta data-data yang diperoleh dari lapangan. Disamping itu juga mengambil rujukan hasil karya tulis, jurnal dan referensi lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat di analisa pada waktu kejadian itu terjadi. Fungsi observasi secara lebih rinci terdiri dari deskripsi, mengisi dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan. Deskripsi berarti observasi digunakan untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci gejala yang terjadi. Observasi juga dapat diperoleh dari sikap dan perilaku narasumber, serta observasi dokumen-dokumen terkait dengan kebutuhan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.³⁹ Wawancara yang dimaksud disini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan-peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

³⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, 105

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Daerah Kota Metro

1. Sejarah Kota Metro

Kota Metro berasal dari Bahasa Jawa “*mitro*” yang berarti sahabat (mitra), sedangkan dalam Bahasa Belanda adalah “*meterm*” yang berarti pusat (*centrum*). Masa hindia Belanda tahun 1937, Kota Metro merupakan Onder Distrik (setingkat kecamatan) Sukadana masuk Marga Nuban. Wilayah Kota Metro pada zaman Jepang masuk ke dalam bagian Lampung Syu dengan nama Metro Ken. Setelah kemerdekaan tahun 1945, berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945 maka Kota Metro menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati. Pada waktu itu Bupati pertama yang menjabat adalah Burhanudddin (1945-1948).⁴⁰

Sebelum menjadi Kota Administratif, Metro merupakan suatu wilayah kecamatan Metro Raya dengan 6 (enam) kelurahan antara lain : 1) Metro; 2) Mulyojati; 3) Tejosari; 4) Hadimulyo; 5)Yosodadi; dan 6) Ganjar Agung. Serta terdiri dari 11 (sebelas) desa, antara lain: Karangrejo, Banjarsari, Purwosari, Margorejo, Rejomulyo, Sumpersari, Kibang, Margototo, Margajaya, Sumber Agung, dan Purbosembodo. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun

⁴⁰ RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021

1986 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 September 1987. Kota Administratif Metro tumbuh pesat sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, perdagangan dan sebagai pusat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut, Kota Administratif Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kota Madya Metro.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom yang diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro dimekarkan menjadi 5 (lima) Kecamatan, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kelurahan.⁴¹

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Marga tanggal 17 Mei 1937 daerah kolonisasi ini dipisahkan dari hubungan marga, dan pada hari selasa tanggal 9 Juni 1937 nama desa Trimurjo diganti dengan nama Metro. Tanggal 9 Juni inilah yang menjadi dasar penetapan Hari Jadi Kota Metro, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan daerah Kota Metro Nomor 11 tahun 2002 tentang Hari Jadi Kota Metro.⁴²

Tabel 1. Daftar Nama Walikota dan Wakil Walikota Metro

⁴¹Badan Pusat Statistik Kota Metro Tahun 2013

⁴²RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021

No	Wali Kota & Wakil Walikota	Masa Jabatan	Prd	Ket.
1.	Mozes Herman & Lukman Hakim	2000 – 2005	1	
-	Ir. H. Joko Umar Said	2004 – 2005	-	Pelaksana Tugas Sementara
2.	Lukman Hakim & Djohan	2005 – 2010	2	
	Lukman Hakim & Saleh Chandra	2010 – 2015	3	
-	Achmad Chrisna Putra	2015 – 2016	-	Pelaksana Tugas Sementara
3.	H. Ahmad Pairin, S.Sos & Djohan	2016 – 2021	4	

2. Visi Misi Kota Metro

Visi merupakan cita-cita atau tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang periode 2016-2021, Visi Pembangunan Kota Metro adalah **“Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif”**. Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan partisipasi seluruh *stakeholder* di Kota Metro untuk mengoptimalkan visi Kota Metro 2016-2021, terdapat 4 (empat) kalimat kunci, yaitu:

- 1) Kota Pendidikan mengandung makna terwujudnya masyarakat yang berbudaya belajar yang akan dicapai melalui pendidikan *inklusif* dengan prinsip “*education for all*”, pendidikan *lifskill*, pendidikan keagamaan, dan pendidikan berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Wisata Keluarga mengandung arti sebagai wisata yang aman, nyaman, beretika, bermoral, mengandung unsur edukasi, cocok untuk semua umur dan golongan, yang dapat menjadi ciri khas dan daya tarik Kota Metro. Visi Wisata Keluarga dicapai melalui pemanfaatan potensi *existing* wisata alam dan buatan serta melalui pengembangan industri kreatif sebagai salah satu unsur penunjang pariwisata.
- 3) Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung arti bahwa pembangunan di seluruh bidang yang didukung sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik.
- 4) Pembangunan partisipatif mengandung arti penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan dengan partisipasi publik untuk menentukan *good governance*.⁴³

⁴³ RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan Kesehatan.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata.
- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang *good governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.⁴⁴

3. Letak Geografis Kota Metro

Posisi geografis Kota Metro secara administratif terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan dengan total luas wilayah 68,74 km² atau 6.874 ha. Kota Metro memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

⁴⁴ RPJMD Kota Metro Tahun 2016-2021

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kota Metro Tahun 2013

d. Sebelah Barat : Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Wilayah Administratif Kota Metro terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan. Kecamatan yang wilayahnya paling luas adalah Kecamatan Metro Utara seluas 19,64 km² atau 28,57% dari luas wilayah Kota Metro, sementara yang paling kecil adalah Kecamatan Metro Barat seluas 11,28 km² atau 16,41% terhadap luas wilayah Kota Metro.

Tabel 2. Luas Wilayah Administratif Kota Metro

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	% terhadap luas total
1.	Metro Pusat	Metro	2,28	3,32
		Imopuro	1,19	1,73
		Hadimulyo Timur	3,37	4,90
		Hadimulyo Barat	1,50	2,18
		Yosomulyo	3,37	4,90
Sub total			11,71	17,04
2.	Metro Utara	Banjarsari	5,75	8,36
		Purwosari	2,55	3,71
		Purwoasri	3,62	5,27
		Karangrejo	7,72	11,23
Sub total			19,68	28,57
3.	Metro Selatan	Rejomulyo	4,75	6,91
		Margorejo	2,46	3,58

		Margodadi	2,87	4,18
		Sumpalsari Bantul	4,25	6,18
Sub total			14,33	20,85
4.	Metro Timur	Iring Mulyo	1,89	3,22
		Yosodadi	3,36	4,89
		Yosorejo	1,22	1,77
		Tejosari	3,76	5,47
		Tejo Agung	1,55	2,25
Sub total			11,78	17,14
5.	Metro Barat	Mulyojati	2,95	4,29
		Mulyosari	3,03	4,41
		Ganjar Agung	2,88	4,19
		Ganjarsari	2,42	3,52
Sub Total			11,28	16,41
Luas total wilayah Kota Metro			68,74	100,00

4. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang peresmian dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Metro pada mulanya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: 10 Bagian Sekretariat Daerah, 4 Badan dan 2 Kantor. Perkembangan berikutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana

diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9); Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 40).⁴⁶

Tabel 3. Daftar Nama Pejabat Pemerintah Daerah Kota Metro
Periode 2016-2021

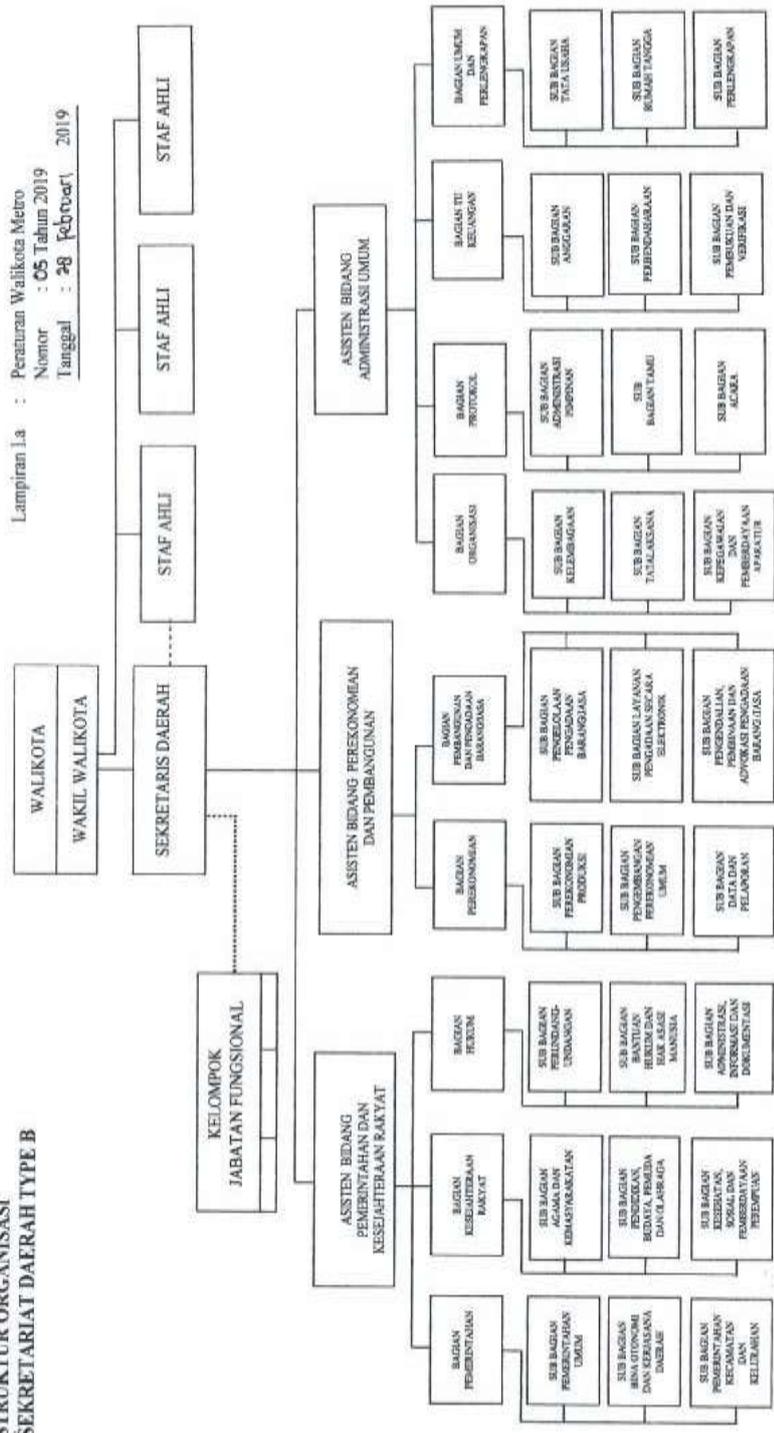
NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Ahmad Pairin, S.Sos	Walikota
2.	Djohan, SE., MM.	Wakil Walikota
3.	Misnan, S.Sos	Pj. Sekretaris Daerah
4.	Drs. Ridhwan, SH., MH	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5.	Ir. Yeri Ehwan, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
6.	Misnan, S.Sos	Asisten Administrasi Umum
7.	Juni Kuswati, SH	Staf Ahli Bidang I
8.	Dra. Dian Christini	Staf Ahli Bidang II
9.	Komarudin, S.Sos., MM	Staf Ahli Bidang III
10.	Dra. Rosita, MM	Ka. Bagian Pemerintahan
11.	Rani Junaida, S.IP., MM	Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat
12.	Ika Pusparini Anindita Jayasinga, SH., MH	Ka. Bagian Hukum
13.	Elmanani, S.Sos., MM	Ka. Bagian Perekonomian dan SDA

⁴⁶ Arsip Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Metro

14.	Surahman, ST	Ka. Bagian Administrasi Pembangunan
15.	Deddu Hasmaru, S.STP., MM	Ka. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
16.	Drs. Edy Wijaya F, M.Si	Ka. Bagian Organisasi
17.	Drs. Sapto Yuwono	Ka. Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan
18.	Ac Yuliwati, SH	Ka. Bagian Umum

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH TYPE B**

Lampiran Ia : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 05 Tahun 2019
 Tanggal : 28 Februari 2019



WALIKOTA METRO,

 ACHMAD PAIRIN

B. Konteks Kepemimpinan dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif

Siyasah Syariyyah di Pemerintah Daerah Kota Metro

Kota Metro adalah salah satu kota di Provinsi Lampung yang memiliki visi dalam masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2016-2021 adalah Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pembangunan Partisipatif. Kota Metro mempunyai seorang pemimpin muslim dengan mayoritas penduduknya adalah Islam. Selain mayoritas penduduknya muslim, ada juga yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Sehingga terdapat keberagaman dalam bidang keagamaan, ras dan suku di Kota Metro.

Pemerintahan dibentuk dengan maksud membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan roda pemerintahan yang baik dan bersih adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan suatu negara yang demokratis dalam era globalisasi saat ini. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha.

Kepemimpinan mempunyai peranan penting dan setral dalam kehidupan organisasi maupun berkelompok. Untuk mencapai tujuan

bersama, manusia di dalam organisasi perlu membina kebersamaan dengan mengikuti pengendalian dari pimpinannya. Dengan pengendalian tersebut, perbedaan keinginan, kehendak, kemauan, perasaan, kebutuhan dan lain-lain dipertemukan untuk digerakkan kearah yang sama. Dengan demikian, berarti di dalam setiap organisasi perbedaan individual dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang sama sebagai kegiatan kepemimpinan.

Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan, dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tidak diperoleh dengan cepat dan segera, namun sebuah proses yang terbentuk dari waktu ke waktu hingga akhirnya mengkristal dalam sebuah karakteristik. Artinya ada sebagian orang yang memiliki sifat kepemimpinan namun dengan usahanya yang gigih mampu membantu lahirnya penegasan sikap kepemimpinan pada dirinya tersebut.

Dorongan dan semangat kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin mampu menggerakkan organisasi ke arah yang diinginkan, namun begitu pula sebaliknya jika kualitas dan kompetensi seorang pemimpin belum mencukupi untuk membantu mendorong ke arah kemajuan, maka artinya pemimpin tersebut hanya memimpin dengan tujuan untuk pribadinya dan bukan untuk tujuan keinginan organisasi.

Menurut Bapak Bangkit Haryo Utomo Kepala BAPPEDA Kota Metro mengatakan bahwa untuk menggerakkan pemerintahan kearah yang diinginkan sesuai dengan kemaslahatan umat, diperlukan strategi dalam

penyusunan program kerja, Pemerintah Daerah Kota Metro mempunyai program prioritas yang ditetapkan sesuai dengan visi misi Kepala Daerah pada saat pemilihan dan disusun berdasarkan kewenangan dan urusan pemerintah daerah. Program prioritas adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Bidang Pendidikan

- a. Peningkatan sarana prasarana Pendidikan melalui penyediaan seragam sekolah gratis untuk meningkatkan angka partisipasi Pendidikan.
- b. Pemerataan pelayanan Pendidikan untuk mewujudkan *education for all*.
- c. Peningkatan kordinasi, komunikasi, dan peran serta seluruh *stakeholder* Pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses output Pendidikan.

2. Bidang Kesehatan

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana Kesehatan
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan Kesehatan
- c. Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan
- d. Pengembangan budaya hidup sehat

3. Bidang Ekonomi

- a. Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata keluarga untuk meningkatkan perekonomian lokal masyarakat
- b. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perdagangan dan jasa

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Bangkit Kepala BAPPEDA Kota Metro, pada tanggal 12 September 2020

- c. Peningkatan Kerjasama swasta untuk meningkatkan produktivitas UMKM
 - d. Penataan pasar tradisional dan pasar modern untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi lokal.
4. Bidang Infrastruktur
- a. Peningkatan perencanaan infrastruktur jaringan jalan, irigasi, *drainase* dan air minum yang terintegrasi
 - b. Peningkatan kualitas *drainase* kota
 - c. Peningkatan kualitas infrastruktur dan *utilitas* kota
 - d. Peningkatan kualitas dan sanitasi hunian
 - e. Optimalisasi penataan ruang yang berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi
- a. Peningkatan akses pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur, fasilitas pelayanan di ruang publik, dan pemanfaatan teknologi informasi
 - b. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui peningkatan kualitas perencanaan, penggunaan pendekatan *money follow program priority* dalam sistem penganggaran, dan pengendalian kinerja dengan pendekatan partisipatif.
6. Sosial
- a. Program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
 - b. Pemberian bantuan dan sarana prasarana ibadah

- c. Penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan akses Pendidikan, dan peningkatan produktivitas UMKM.

Menurut Bapak Misnan, S.Sos PJ Sekretariat Daerah Kota Metro bahwa pimpinan mampu memilah antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Pimpinan cukup memperhatikan bawahan dalam memberikan masukan untuk penyelesaian tugas bawahan dan melakukan kontrol timbal balik antara pimpinan dan bawahan dalam penyelesaian tugas serta menciptakan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.⁴⁸

Menurut Bapak Djohan, SE., MM Wakil Walikota Metro mengatakan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan dalam hal *management* terhadap bawahannya sudah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Artinya tidak ada tumpang tindih antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain, semua sudah dijalankan secara struktural, baik penempatan pada bidang pembangunan, tata kota, Kesehatan, Pendidikan, administrasi daerah dan lain sebagainya.⁴⁹

Menurut Ibu Dra. Rosita, MM Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro, bahwa pimpinan mempunyai jiwa kepemimpinan yang religius dalam menjalankan pemerintahan serta menghormati perbedaan Agama, Suku, dan Budaya yang ada di Kota Metro. Pimpinan juga memberikan perhatian dalam memberikan masukan

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Misnan, S.Sos PJ Sekretaris Daerah Kota Metro, pada tanggal 16 September 2020

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Djohan, SE., MM Wakil Walikota Metro, pada tanggal 16 September 2020

kepada bawahan yang bersifat membimbing dalam pelaksanaan tugas sehingga target pencapaian kerja sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.⁵⁰

Menurut Yahya Rachmat dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro mengatakan bahwa pimpinan mempunyai rencana-rencana strategis pada pelaksanaan pembangunan daerah dan selalu memiliki gagasan baru dalam memajukan pembangunan daerah. Tentunya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Metro. Upaya yang sungguh-sungguh dilakukan Pemerintah dalam mengatasi berbagai hambatan dalam Pemerintahan. Pimpinan juga memperhatikan kesejahteraan bawahan dan melakukan *controlling* terhadap kinerja bawahan agar target kerja tercapai.⁵¹

Menurut Anastasia Kepala Sub Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Metro, pimpinan memiliki kemampuan yang baik dalam pengawasan terhadap bawahannya, dan selalu cepat tanggap dalam menghadapi berbagai permasalahan dan mengatasi berbagai hambatan dalam pemerintahan, serta selalu memperhatikan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.⁵²

⁵⁰ Wawancara dengan Dra. Rosita, MM Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro, pada tanggal 25 September 2020

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Yahya Rachmat Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro, pada 25 September 2020

⁵² Wawancara dengan Ibu Anastasya Kepala Sub Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Metro, pada tanggal 7 Desember 2020

Menurut Ibu Tri Aswati salah satu Warga Kota Metro mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kota Metro masih banyak kesenjangan sosial di bidang ekonomi, banyak masalah yang perlu di berikan solusi. Misal dalam Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) masih banyak yang belum tepat sasaran. Tetapi untuk di infrastuktur sudah baik, walaupun masih ada sedikit yang perlu di perbaiki di beberapa titik.⁵³

Menurut Ibu Sisca Mutiara warga Kota Metro yang bekerja di salah satu Rumah Sakit di Kota Metro mengatakan bahwa kepemimpinan di Kota Metro sudah berjalan baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Terlebih lagi di Bidang Kesehatan, Pemerintah cepat tanggap dalam mengatasi wabah Covid dengan menyiapkan sarana dan prasarana Kesehatan yang cukup memadai.⁵⁴

Menurut Ibu Siti Aminah salah satu penggerak UMKM di Kota Metro mengatakan bahwa untuk kepemimpinan pemerintah Daerah Kota Metro sudah baik, tetapi pihak bawahan yang kurang dalam menyampaikan atau mensosialisasikan informasi-informasi kepada masyarakat. Jika dilihat dari bidang ekonomi pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan kualitas koperasi UMKM dan produk unggulan daerah sudah sangat bagus, dan tentunya sangat membantu perekonomian lokal yang ada di Kota Metro.⁵⁵

⁵³ Wawancara dengan Ibu Tri Aswati tokoh masyarakat Kota Metro, pada tanggal 5 Januari 2021

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Sisca tokoh masyarakat Kota Metro, pada tanggal 5 Januari 2021

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah penggerak UMKM Kota Metro, pada tanggal 5 Januari 2021

Menurut Bapak Drs. Wardaya, M.Pd salah satu warga Kota Metro sebagai akademisi disalah satu perguruan tinggi di Kota Metro mengatakan bahwa Kepemimpinan Pemerintah Daerah Kota Metro menjalankan visi misi daerah dengan tanggung jawab dan disiplin. Terstruktur dalam memberikan perintah kepada bawahan sehingga pemerintahan berjalan sesuai dengan tugas masing-masing komponen pemerintahan yang ada di Kota Metro. Penertiban dari segala aspek baik Pendidikan, wisata, ekonomi, dan pembangunan menjadikan Kota Metro semakin baik sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kota Metro. sebagai contoh Kota Metro melakukan pembangunan 3D agar Kota Metro tidak hanya terlihat dari bawah, namun juga nampak indah jika dilihat dari atas, melakukan penertiban di daerah taman merdeka dari pedagang kemudian para pedagang dialokasikan menjadi satu sehingga menjadi semacam mini pasar, penerangan jalan dilakukan sehingga masyarakat Kota Metro merasa aman dan nyaman. Pemanfaatan lahan untuk wisata di beberapa titik di Kota Metro juga dilakukan Pemerintah Daerah Kota Metro. Partisipasi masyarakat juga menjadi sinergi pemerintah dalam menjalankan pembangunan di Kota Metro. Dengan visi misi Pemerintah Daerah Kota Metro, tentunya terdapat kebermanfaatannya bagi masyarakat dan menjadikan Kota Metro sekarang lebih baik dan mengalami kemajuan.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. Wardaya, M.Pd salah satu akademisi di Kota Metro, pada tanggal 5 Januari 2021.

C. Analisis Konteks Kepemimpinan dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif *Siyasah Syariyyah* di Pemerintah Daerah Kota Metro

Analisis merupakan kegiatan penyidikan suatu peristiwa dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dari peristiwa dengan mengetahui hubungannya satu sama lain dan fungsi dari keseluruhan peristiwa. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Validasi data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Jawaban analisis data di dapat langsung dari para narasumber yang merupakan sumber data primer dari subyek penelitian ini. Penelitian ini mengumpulkan data dengan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari obyek, begitu pula dengan dokumentasi dan observasi.

Tabel 4. Kisi-Kisi Wawancara

Variabel	Indikator	Indikator Perilaku	Prediktor	Item-Item Pertanyaan	No Item	
Kepemimpinan	Proses	Persiapan	Persiapan Pembuatan Program	Strategi Menyusun program jangka pendek, menengah, dan jangka Panjang	1	
				Penilaian terhadap pengimplementasian kepemimpinan dalam mengelola kesejahteraan rakyat sesuai dengan kemaslahatan rakyat	2	
			Menilai	Menilai Proses Kerja	Penilaian dalam mengkoordinir bawahan	3
				Menilai Kinerja Bawahan dan Pengawasan	Penilaian terhadap kinerja bawahan	4
			Menguji Hasil	Menguji Hasil Dari <i>Management</i> Waktu Kerja	Strategi <i>manage</i> waktu dalam pencapaian target kerja	5

Berdasarkan pemaparan data lapangan di Pemerintah Daerah Kota Metro tentang Kepemimpinan Perspektif *Siyasah Syariyyah* bahwa kepemimpinan bertujuan untuk mengatur kepentingan umat manusia dengan kebijakan-kebijakan politik untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari berbagai kemudhorotan.

Untuk melihat lebih lanjut sejauh mana kepemimpinan Pemerintah Daerah Kota Metro dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber, maka dapat dijelaskan melalui uraian di bawah ini.

1. Analisis Terhadap Strategi Program Pemerintah Daerah Kota Metro

Strategi merupakan sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan aktivitas dalam kurun waktu tertentu. di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, dan mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan perencanaan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Rangkaian kebijakan dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi misi di Kota Metro tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BAPPEDA Kota Metro yang menyatakan, bahwa “.....strategi dalam penyusunan program kerja, Pemerintah Daerah Kota Metro mempunyai program prioritas yang ditetapkan sesuai dengan visi misi Kepala Daerah”.

Menurut Ibu Tri Aswati salah satu Warga Kota Metro mengatakan bahwa “....infrastruktur di Kota Metro sudah baik, walaupun masih ada sedikit yang perlu di perbaiki di beberapa titik”.

“.....di Bidang Kesehatan, Pemerintah cepat tanggap dalam mengatasi wabah Covid dengan menyiapkan sarana dan prasarana Kesehatan yang cukup memadai”. Pendapat Ibu Sisca salah satu pegawai Rumah Sakit di Kota Metro.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Metro dalam hal Strategi Program memiliki program prioritas di berbagai bidang yakni meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur, Reformasi Birokrasi, dan Bidang Sosial.

2. Analisis Terhadap Pengimplementasian Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Metro untuk Kesejahteraan dan Kemaslahatan Masyarakat

Kebijakan umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan atau privat. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (*political*), yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Kota Metro, Ibu Tri menyatakan bahwa “.....masih terdapat

kesenjangan sosial dan kurangnya sosialisasi dari kebijakan pemerintah di bidang ekonomi.

Menurut Ibu Siti Aminah salah satu penggerak UMKM di Kota Metro mengatakan bahwa “.....untuk kepemimpinan pemerintah Daerah Kota Metro sudah baik, tetapi pihak bawahan yang kurang dalam menyampaikan atau mensosialisasikan informasi-informasi kepada masyarakat”.

Berdasarkan wawancara beberapa tokoh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasakan bahwa masih terdapat kesenjangan atau kurangnya komunikasi antara pimpinan dan bawahan terkait dengan transparansi kegiatan di lapangan.

3. Analisis Perhatian Pimpinan dalam Memberikan Masukan untuk Penyelesaian Tugas

Mengetahui lebih lanjut kepemimpinan Pemerintah Daerah Kota Metro terhadap perhatian yang diberikan kepada bawahan, maka hasil wawancara dengan pegawai, PJ Sekretariat Daerah Kota Metro, bapak Misnan mengatakan bahwa “.....pimpinan cukup memperhatikan bawahan dalam memberikan masukan untuk penyelesaian tugas bawahan”.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro, Ibu Rosita mengatakan bahwa “....Pimpinan juga memberikan perhatian dalam memberikan masukan kepada bawahan yang bersifat membimbing dalam pelaksanaan tugas”.

Maka tergambar kepemimpinan Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan kontrol timbal balik dalam memberikan perhatian dan masukan dalam penyelesaian tugas bawahan.

4. Analisis Pengawasan Pimpinan kepada Kinerja Bawahan

Ada banyak alasan untuk menentukan kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya. Tetapi masalah yang selalu berulang dalam semua organisasi yang gagal adalah tidak atau kurangnya pengawasan yang memadai. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Metro, bahwa pimpinan memiliki kemampuan yang baik dalam pengawasan terhadap bawahannya, dan selalu cepat tanggap dalam menghadapi berbagai permasalahan dan mengatasi berbagai hambatan dalam pemerintahan.

Artinya Pemerintah daerah Kota Metro melakukan Pengawasan terhadap kinerja bawahan agar perencanaan yang diharapkan oleh manajemen pemerintahan dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

5. Analisis Strategi *Memmanage* Waktu dalam Pencapaian Kerja

Time Management merupakan salah satu keterampilan penting kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi, khususnya terkait masalah pengambilan keputusan tentang masa depan daerah sangat bergantung pada pihak tingkat manajemen. *Time management* adalah

tindakan dan proses perencanaan dan pelaksanaan kontrol sadar atas sejumlah waktu yang akan digunakan untuk mencapai target kerja, khususnya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai Bagian Pemerintahan, Bapak Yahya mengatakan bahwa “...Pimpinan juga memperhatikan kesejahteraan bawahan dan melakukan *controlling* terhadap kinerja bawahan agar target kerja tercapai”. Hal yang sama juga dikatakan oleh PJ Sekretariat Daerah Kota Metro, Bapak Misnan mengatakan bahwa “... Pemerintah melakukan kontrol timbal balik antara pimpinan dan bawahan dalam penyelesaian tugas serta menciptakan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan daerah”.

Kesimpulan berdasarkan wawancara tersebut, Pemerintah Daerah Kota Metro memperhatikan efisiensi waktu terhadap kinerja bawahan sehingga apa yang sudah direncanakan bisa tercapai sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun kesimpulan yang dapat diuraikan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah Konteks Kepemimpinan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif *Siyasah Syariyyah* Studi Pemerintah Daerah Kota Metro mempunyai konteks kewenangan penguasa/Pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan umat. Pimpinan Daerah Kota Metro dalam menggerakkan pemerintahan kearah yang diinginkan sesuai dengan kemaslahatan umat, mempunyai program prioritas di berbagai bidang

kehidupan yang telah dilaksanakan sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kota Metro. Program yang direncanakan sudah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah cepat tanggap dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pemerintahan. pimpinan mempunyai jiwa religius dan profesional serta memiliki toleransi terhadap bawahan. Pimpinan juga melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahan sehingga program kerja bisa tercapai. Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui peningkatan kualitas perencanaan, penggunaan pendekatan *money follow program priority* dalam sistem penganggaran, dan pengendalian kinerja dengan pendekatan partisipatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu dari perspektif teori kepemimpinan, kepemimpinan Pemerintah Daerah Kota Metro mirip dengan teori kelompok dimana dalam mengembangkan organisasi Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan pertukaran yang positif antara pimpinan dan bawahannya untuk mencapai visi misi. Kemudian dalam hal stimulasi intelektual yaitu selalu membuat rancangan-rancangan strategi dan pemecahan masalah melalui diskusi dengan bawahannya.

Sesungguhnya kemampuan pemerintah khususnya kemampuan seorang pemimpin pemerintahan yang menjalankan dan menyelenggarakan jalannya roda kepemimpinan jelas tidak hanya mempunyai kemampuan atau kompetensi yang sangat memadai atau lebih dari cukup untuk dapat mengelola dan mengatur pemerintahan. Tetapi juga memiliki integritas, kemampuan atau kompetensi dan politik pemerintahan yang kuat dilandasi dengan sebuah paradigma atau tolak ukur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai agama

sehingga dapat mengarahkan pemerintahan yang dipimpinnya sampai kepada tujuan yang telah di tentukan atau ditetapkan.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas maka dapat menyatakan bahwa Konteks Kepemimpinan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Perspektif Siyarah Syariyyah Studi Pemerintah Daerah Kota Metro mempunyai konteks kewenangan penguasa/pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan umat.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengalami keterbatasan atau kesulitan untuk bertemu dengan sumber data primer, yang seharusnya untuk mendukung data penelitian dilakukan wawancara dengan salah satu sumber data primer yakni Walikota Metro. Karena terdapat kesulitan prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti.

C. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian partisipasi masyarakat, akuntabilitas, professional, dan transparansi Pemerintah Daerah Kota Metro serta seluruh stafnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan, demi terpeliharanya *Good Governance* di Daerah Kota Metro.

2. Meningkatkan peran sosial media untuk mensosialisasikan apapun yang bermanfaat kepada masyarakat, misalnya seperti berita kegiatan maupun mengenai pelayanan yang dilakukan. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Metro dapat berinteraksi dengan masyarakat untuk membangun hubungan yang harmonis dan interaktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aprialdo Rachman, Dylan. *Lima Kepala Daerah di Lampung yang dijerat KPK*.
dalam www.kompas.com diunduh pada 10 Juni 2020.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*. Bandung:
PT Mizan Pustaka, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kota Metro Tahun 2013.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah*, Jakarta: Kencana, cet-6, 2017.
- Fahmi, Irham. *Managemen Kepemimpinan Teori & Aplikasi*. Bandung: Alfabeta,
2013.
- Farkhani. *Hukum Tata Negara*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Fauziah, Eva. *“Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam
Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus
Desa Hinai Kanan Kec. Hinai Kab. Langkat)”*. Medan: Skripsi Fakultas
Syari’ah dan Hukum, 2019.
- Ilmar, Aminudin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group,
2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *al-Siyasah al-Syar’iyah*,. Jakarta: Dar al-Anshar al-
Qahirat, 1997.

Khoirul Fata, Ahmad. *Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*.

Jurnal Review Politik. Volume 02 no 01. Juni 2012.

Lampung Post. *KPK OTT Kepala Daerah di Lampung*. dalam www.lampungpost.com diunduh pada 10 Juni 2020.

Manan, Bagir. *Hukum Positi Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press. 2004.

Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.

Nawawi, Imam. *Riyadh ash Shalihin*. Jakarta : Pustaka Amani. cet. ke-4, 2013.

Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Rahmana, Agung Pangestu Dwi. “*Tinjauan Fiqh Siyasah Syar’iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)*” (Medan: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum), 2018.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Shalih, Muhammad. *Politik Islam Ta’liq Siyasah Syariyyah Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Griya Ilmu, 2019.

Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Sultan Agung
VOL XLIV NO. 118 Juni-Agustus 2009.

Siagian, Sondang P. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. cet. ke-6. Jakarta: Rineka
Cipta, 2019.

Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*". Bandung:
CV. Alfabeta, 2012.

Sunggono, Bambang. "*Metodologi Penelitian Hukum*". Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1997.

Taj, Abdurrahman. *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir:
Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.

Trimo, Soejono. *Analisis Kepemimpinan*. Bandung : Offset Angkasa, 1995.

Zuhairi, Kuryani, Dedi Irwansyah, Wahyu Setiawan, Yuyun Yunarti, Imam
Mustofa. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*. Metro: IAIN
Metro, 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metro.univ.ac.id; email: Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-469 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

09 April 2020

Kepada Yth:

1. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
 2. Firmansyah, M.H
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DEWI TRILIA
NPM : 1702010018
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : KONTEKS KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYAH (STUDY PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulakna

OUTLINE

KONTEKS KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH (STUDI PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Definisi Kepemimpinan Dalam Sistem Ketatanegaraan

- B. Tipologi Kepemimpinan
 - 1. Kepemimpinan Perspektif Ketatanegaraan
 - 2. Kepemimpinan Perspektif Siyasah Syariyyah
- C. Pengertian Siyasah Syariyyah
- D. Landasan Hukum Kepemimpinan dalam Konteks Hukum Tata Negara dan Siyasah Syariyyah
 - 1. Landasan Yuridis Kepemimpinan dalam Konteks Hukum Tata Negara Indonesia
 - 2. Al-Quran
 - 3. Hadits
- E. Maqashid Syariah
 - 1. Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat
 - 2. Berdasarkan Kolektif dan Personal
 - 3. Kebutuhan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Daerah Kota Metro
 - 1. Sejarah Kota Metro
 - 2. Visi Misi Kota Metro
 - 3. Letak Geografis Kota Metro
 - 4. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro
 - B. Konteks Kepemimpinan dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasah Syariyyah Pemerintah Daerah Kota Metro
 - C. Analisis Kepemimpinan dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Siyasah Syariyyah Pemerintah Daerah Kota Metro
-

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Juli 2020

Peneliti



Dewi Trilia

NPM. 1702010018

Megetahui,

Pembimbing I



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Pembimbing II



Firmansyah, M.H
NIP.198501292019031 002

KISI-KISI WAWANCARA

Variabel	Indikator	Indikator Perilaku	Prediktor	Item-item pertanyaan	No Item
K E P E M I M P I N A N	P R O S E S	Persiapan	- Persiapan Pembuatan Program	- Strategi Menyusun program jangka pendek, menengah, dan jangka Panjang	1
		Menilai	- Menilai Proses Kerja	- Penilaian terhadap pengimplementasian kepemimpinan dalam mengelola kesejahteraan rakyat sesuai dengan kemaslahatan rakyat	2
				- Penilaian dalam mengkoordinir bawahan	3
			- Menilai Kinerja Bawahan Dan Pengawasan	- Penilaian terhadap kinerja bawahan	4
		Menguji Hasil	- Menguji Hasil Dari <i>Management</i> Waktu Kerja	- Strategi <i>manage</i> waktu dalam pencapaian target kerja	5

IDENTITAS NARASUMBER :

Nama :

Jenis Kelamin :

Asal Instansi :

Jabatan :

PERTANYAAN :

1. Bagaimana strategi Menyusun program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang?
 2. Bagaimana metode pimpinan dalam mengimplementasikan kepemimpinan dalam mengelola kesejahteraan rakyat Kota Metro sesuai dengan kemaslahatan masyarakat?
 3. Bagaimana strategi pimpinan dalam mengkoordinir bawahan?
 4. Bagaimana strategi pimpinan dalam melakukan pengawasan?
 5. Bagaimana strategi pimpinan *manage* waktu dalam pencapaian target kerja?
-



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 918/In.28/D.1/TL.00/08/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KESBANGPOL KOTA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 917/In.28/D.1/TL.01/08/2020, tanggal 31 Agustus 2020 atas nama saudara:

Nama : **DEWI TRILIA**
NPM : 1702010018
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONTEKS KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYARIAH (STUDI PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Agustus 2020
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 917/In.28/D.1/TL.01/08/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : DEWI TRILIA
NPM : 1702010018
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONTEKS KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYARIAH (STUDI PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol NO. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 070/157/B-6/REG/2020

MEMBACA : Surat dari Fakultas Syariah IAIN Metro Nomor : 918/In.28/D.1/TL.00/08/2020 Tanggal : 31 Agustus 2020 Perihal : Izin Research

MENINGAT : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.

MEMPERHATIKAN : MAKSUD SURAT TERSEBUT.

DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA

Nama : **DEWI TRILIA**
NPM : 1702010018
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro
Lokasi Penelitian : PEMDA Kota Metro
Jangka waktu : 1 (satu) bulan
Pengikut / Anggota : -
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan IAIN Metro
Tujuan : Mengadakan Research dengan Judul : " **KONTEKS KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYARIAH (STUDI PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO)** "

Catatan : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 01 September 2020

PIK KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA METRO

DENNY FERDINAN S.RAYA,SH
PEMBINA

NIP. 196312221994031004

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Trilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010018 Semester/TA : VII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 10/12/2020	✓	- Perbaiki kembali semua: catatan yang dibarengkan - tambahkan analisis hasil penelitian - lampirkan bukti wawancara - lampirkan Apriat - Verbaiki EVD	dt
	Jumat 11/12/2020	✓	Perbaiki kembali tabel yg ada - lampirkan bukti wawancara - lampirkan bab V	di

Pembimbing II

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Dewi Trilia
NPM. 1702010018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Trilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010018 Semester/TA : VII/ 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	kamis 7-1-21	✓	Perbaiki Metode Penulisan istilah /spasi/ no. sesuai dgn buku Panduan yang ada: - tambahkan Analisis & data tabel - Perbaiki Penulisan pada tabel - sempurnakan daftar isi 1 Analisis Para 1 tambahkan 2 Analisis Para 2 tambahkan 3 Analisis Para 3 4 - 1 - 1 - - Hasil Pertanyaan Penelitian mana? - perbaiki semua	Dr

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Dewi Trilia
NPM. 1702010018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Trilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010018 Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8-1-21	✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kesalahan yg masih ada sesuai catatan.- belum menjawab pertanyaan peneliti ? pemb dr hasil penelitian- ACC banyut ke pembimbing I! juga banyut lampiran APd & hasil wawancara	

Pembimbing II

Firmansyah, MH
NIP. 19850129 201903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Dewi Trilia
NPM. 1702010018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dewi Trilia Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010018 Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 13-1-2021	✓	Bab 1 dan 2 acc untuk dimaksudkan	

Pembimbing I

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP: 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dewi Trilia
NPM. 1702010018





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-30/In.28/S/U.1/OT.01/01/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DEWI TRILIA
NPM : 1702010018
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HUKUM TATA NEGARA

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702010018

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Januari 2021
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id; syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-0091/In.28.2/D/PP.00.9/01/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Triilia
NPM : 1702010018
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	82
2	Kefakultasan	85
3	Keprodian	70
Nilai Akhir		79,00

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Januari 2021

Dekan,



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-0117/ln.28.2/J-HTN/PP.00.9/01/2021

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Trilia
NPM : 1702010018
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Proposal Skripsi
Pembimbing : Dr. Azmi Siradjuddin, L.c., M.Hum
Firmansyah, M.H
Judul : Konteks Kepemimpinan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
Perspektif Siyasah Syariyyah (Studi Pemerintah Daerah Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 21%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Januari 2021

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP. 196506272001121001

RIWAYAT HIDUP



Dewi Trilia dilahirkan di Gumumg Sugih Kabupaten Lampung Tengah 22 mei 1999, merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Sarjingat dan Ibu Subur. Bertempat tinggal di Sidorejo II RT/RW 020/000 Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi lampung. Peneliti menamatkan Pendidikan di SDN 3 Terbanggi Subing, lulus pada tahun 2011, SMPN 2 Bumiratu Nuban, lulus pada tahun 2014, SMAN 5 Metro, lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017, peneliti melanjutkan *study* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN). Pada masa *study*, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul **“Konteks Kepemimpinan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Perspektif Siyasah Syariyyah (Studi Pemerintah Daerah Kota Metro)”**.